KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Taufik: Pembangunan Gedung DPR Urusan Pemerintah
Tanggal : Rabu, 08 November 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 10

Taufik: Pembangunan Gedung DPR Urusan Pemerintah

Purwokerto, Pelita

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan, pembangunan Gedung DPR RI sudah tidak menjadi domain DPR, melainkan sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Karena itu mau dibangun atau pun tidak terserah pemerintah.

"Kami di DPR hanya berharap, jangan sampai memakan korban terlebih dahulu, baru kemudian dibangun gedungnya," kata Taufik saat membuka acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat Parlemen di Purwokerto, Jawa Tengah akhir pekan kemarin.

Taufik mengatakan Gedung DPR sebenarnya milik pemerintah. Tapi ketika DPR yang paling tahu kondisi gedung mengajukan pembangunan malah dibuli, dicaci maki dan dikomentari tidak menyenangkan oleh publik.

"Karena itu, ya sudah lah. Mau dibangun pemerintah atau tidak ya biarkan saja.Pesan kami cuma satu, jangan sampai gedung itu memakan korban lebih dulu baru publik prihatin dan pemerintah sadar," tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ditegaskannya DPR juga ingin menyelamatkan diri darintaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau mau jujur, ruang kerja eksekutif jauh lebih bagus, lebih besar dan lebih mewah dari ruang kerja anggota dewan. Tapi tidak ada yang meributkan," ujar Taufik.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Novita Wijayanti yang juga Politisi dari Gerindra sepakat dengan rencana pemerintah yang akan membangun gedung baru di Kompleks Senayan senilai Rp601 miliar. Kendati secara kelembagaan, Gerindra tidak sepakat dengan rencana tersebut.

"Semua pembangunan gedung diserahkan kepada Kementerian PUPR, kami di BURT tidak ikut-ikutan. Karena gedung DPR itu bukan milik anggota DPR, milik wartawan dan rakyat. Tetapi sepenuhnya milik pemerintah. Karenanya semua, menjadi urusan pemerintah," tutur dia.

Novita juga mempertanyakan kepada para pengkritik pembangunan Gedung DPR. Sementara gedung-gedung lain yang juga milik negara/pemerintah dibangun di mana-mana dengan anggaran yang sangat besar, tidak ada yang mengeritik.

"Kendati Gerindra beda, tapi saya tidak mau ngomong soal itu, meski kebutuhan gedung baru itu sangat penting. Masa gedung pemerintah bagus-bagus tidak dimasalahkan sementara gedung untuk rakyat dipersoalkan," tegasnya.

"Saya tidak mau dengar ada lagi anggota dewan dan wartawan yang terjebak dan anjlok dalam lift. Jangan kita nunggu ada lift anjlok atau ada yang jatuh dulu baru membangunn. Itu nggak bener," tutur Novita.

Dikatakan dia, beberapa hari lalu terjadi insiden, lift jatuh dari lantai dua, melukai Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menolong ketika itu. "Meski demikian mereka mengatakan masih untung, tidak mati. Itulah orang Jawa," kata dia.

Sementara Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan PKS tidak setuju rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Sebab, pembahasan gedung baru di BanggarDPR tidak pernah ada. "Semenjak awal, bahkan dari periode lalu PKS tidak setuju pembangunan gedung baru DPR RI. Dalam pembahasan RAPBN 2018 di Badan Anggaran tidak pernah dibicarkan apalagi ada persetujuan pembangunan gedung baru DPR RI," tutur Ecky. **(kh)**